

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan negara merupakan sumber utama belanja negara disamping komponen pembiayaan APBN yang meliputi penerapan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang paling aman dan handal karena sifatnya yang fleksibel, lebih mudah untuk dipengaruhi dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak sebagai salah satu instrumen dalam mengatur perekonomian negara dapat dipengaruhi melalui kebijakan negara yang bersangkutan (Budhiarti, 2005).

Pajak adalah pungutan oleh negara kepada penduduknya yang didasarkan pada undang-undang perpajakan, bersifat dapat dipaksakan dan bagi pembayarinya tidak diberikan kontraprestasi atau jasa imbal balik secara langsung. Pengenaan pajak mempunyai tiga fungsi yaitu, sebagai sumber keuangan negara atau *budgetair*, alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (*regularent*) dan fungsi distribusi.

Dilihat dari segi ekonomi, pajak merupakan pengalihan sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pajak ini oleh sektor publik akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Peranan pajak dirasakan semakin penting sehingga setiap tahun target

penerimaan pajak semakin ditingkatkan. Bagi sektor privat, pajak dipandang sebagai beban.

Karena pentingnya peranan pajak bagi negara, maka upaya peningkatan penerimaan pajak dilaksanakan oleh negara salah satunya melalui penerbitan undang-undang perpajakan. Salah satu undang-undang perpajakan yang diterbitkan pemerintah adalah UU nomor 7 tahun 1983 yang diperbarui dengan UU nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Adanya undang-undang perpajakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya serta dapat lebih bertanggung jawab atas segala wewenang dan kepercayaan yang diberikan negara kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya (*self assessment*).

Keberadaan UU No. 17 tahun 2000 untuk selanjutnya diperbarui kembali dengan UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Berdasarkan UU No. 17 tahun 2000, tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia adalah tarif progresif, yaitu tarif pajak yang persentasinya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sedang berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku efektif pada tahun 2009, tarif Pajak Penghasilan Badan berubah dari tarif progresif menjadi tarif tunggal, yaitu (1) 28% (efektif berlaku tahun 2009) dan 25% (efektif berlaku tahun 2010) untuk Wajib Pajak Badan; dan (2) 5% lebih rendah dari tarif nomor (1) untuk perusahaan yang telah go

public yang minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perusahaan khususnya yang telah *go public* akan diuntungkan dengan pemberlakuan tarif pajak baru ini karena tarif pajak efektif perusahaan akan menjadi lebih kecil. Jika manajer berupaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan meminimalkan beban pajak, maka perubahan tarif ini akan memberikan insentif bagi manajer untuk menurunkan laba perusahaan pada tahun sebelum diefektifkannya perubahan tarif pajak tersebut.

Scholes *et. al.* (1992) membuktikan bahwa perusahaan di Amerika Serikat melakukan penundaan pengakuan laba kotor pada tahun sebelum diberlakukannya pengukuran tarif pajak. Guenther (1994) menyatakan bahwa *discretionary current accruals* negatif dengan menunda *earnings* pada periode sebelum diefektifkannya pengurangan tarif.

Yin dan Cheng (2004) menguji apakah perusahaan akan melakukan manajemen laba sebagai respon atas penurunan tarif pajak badan di Amerika Serikat. Yin dan Cheng (2004) membagi sampel penelitiannya ke dalam dua kelompok, yaitu perusahaan yang memperoleh laba (*profit firms*) dan perusahaan yang mengalami kerugian (*loss firms*). Mereka menguji pengaruh dari insentif pajak dan insentif non pajak terhadap perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka merespon perubahan tarif pajak. Yin dan Cheng (2004) menggunakan pendekatan *discretionary current accrual* dalam mendeteksi manajemen laba menemukan bahwa manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang memperoleh laba (*profit firms*)

berhubungan signifikan dengan insentif pajak dan insentif non pajak, sedangkan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang mengalami kerugian (*loss firms*) berhubungan signifikan dengan insentif non pajak saja.

Penelitian di Indonesia mengenai manajemen laba yang dikaitkan dengan perubahan tarif pajak dilakukan oleh Setiawati (2001), serta Hidayati dan Zulaikha (2004). Baik Setiawati (2001) maupun Hidayati dan Zulaikha (2004) menggunakan pendekatan discretionary accrual dalam mendeteksi manajemen laba. Hasil penelitian Setiawati (2001), serta Hidayati dan Zulaikha (2004) tidak berhasil membuktikan adanya manajemen laba dalam rangka merespon perubahan tarif pajak penghasilan di Indonesia. Kelemahan penelitian tersebut terletak pada metodologi penelitiannya yang hanya menggunakan uji beda saja. Di samping itu, tahun yang menjadi sorotan penelitian Setiawati (2001), serta Hidayati dan Zulaikha (2004) dianggap kurang tepat, karena mereka berasumsi bahwa perusahaan akan melakukan manajemen laba pada tahun setelah diberlakukannya perubahan tarif pajak. Tahun yang menjadi sorotan penelitian hendaknya adalah tahun sebelum diberlakukannya perubahan tarif pajak. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran Scholes *et. al* (1992), Guenther (1994), serta Yin dan Cheng (2004) bahwa jika manajer berupaya memaksimalkan nilai perusahaan dengan meminimalkan beban pajak, maka perubahan tarif ini akan memberikan insentif bagi manajer untuk melakukan rekayasa laba perusahaan pada tahun sebelum diefektifkannya perubahan tarif pajak.

Motivasi penulis untuk melakukan penelitian ini adalah untuk menguji penelitian terdahulu dan mengetahui apakah perusahaan *go public* akan melakukan manajemen laba sebagai respon atas perubahan tarif pajak badan di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, penulis mengambil judul **“MANAJEMEN LABA SEBAGAI RESPON ATAS PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN DI INDONESIA (Studi Empiris pada Perusahaan *Go Public* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”**.

B. Perumusan Masalah

Adanya berbagai kesimpulan yang beragam dalam beberapa penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian untuk membuktikan keragaman tersebut. Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang ada, maka dapat disusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan pajak (*Tax Plan*) berpengaruh terhadap manajemen laba ?
2. Apakah *Earning Pressure* berpengaruh terhadap manajemen laba ?
3. Apakah Tingkat utang (*Debt*) berpengaruh terhadap manajemen laba ?
4. Apakah *Earning Bath* berpengaruh terhadap manajemen laba ?
5. Apakah Ukuran Perusahaan (*Size*) berpengaruh terhadap manajemen laba ?

6. Apakah Kepemilikan Manajerial (*Managerial Ownership*) berpengaruh terhadap manajemen laba ?
7. Apakah persentase jumlah saham disetor perusahaan yang diperdagangkan terhadap manajemen laba ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh perencanaan pajak (*Tax Plan*) terhadap manajemen laba.
2. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *Earning Pressure* terhadap manajemen laba.
3. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh Tingkat utang (*Debt*) terhadap manajemen laba.
4. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *Earning Bath* terhadap manajemen laba.
5. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh Ukuran Perusahaan (*Size*) terhadap manajemen laba.
6. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh Kepemilikan Manajerial (*Managerial Ownership*) terhadap manajemen laba.
7. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh persentase jumlah saham disetor perusahaan yang diperdagangkan terhadap manajemen laba.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

a) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi perusahaan terutama tentang kebijakan insentif pajak maupun insentif non pajak yang diberikan pemerintah.

b) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian lain tentang keterkaitan antara kebijakan perpajakan dengan manajemen laba yang dilakukan perusahaan, baik perusahaan yang memperoleh laba maupun perusahaan yang mengalami kerugian.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran awal dalam penelitian ini, pembahasan akan dikelompokkan menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN. Bagian yang memuat latar belakang yang memotivasi penelitian, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini mengulas tentang tinjauan pustaka dan teori, pengetahuan dan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian, kerangka penelitian dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber dan pengumpulan data, variabel penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA. Memuat hasil analisis data menggunakan pengukuran variabel dan uji statistik.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Memuat tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diperoleh dari penelitian ini.